

# SKRIPSI

## ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI RIAU



Oleh :

**FITRIYAH RITONGA**

**NPM 175310928**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

**FITRIYAH RITONGA**  
**NPM 175310928**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan pengukuran *value for money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 dan tahun 2019, yang di peroleh langsung dari objek penelitian yaitu BPKAD Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja di Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada tahun 2018 dan 2019 yang ditinjau dari elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) belum memenuhi prinsip *Value for money* karena terdapat elemen belum mencapai rasio yang maksimal, Pada tahun 2018 perhitungan ekonomis terdapat 9 program dan 55 kegiatan dengan nilai rasio sebesar (64,92) di kategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan 6 program dan 32 kegiatan dengan nilai rasio sebesar (190,96) dikategorikan efisiensi, dan perhitungan efektivitas dengan 2 program dan 25 kegiatan dengan nilai rasio (99,07) dikategorikan tidak efektivitas. Pada tahun 2019 perhitungan ekonomi dengan 7 program dan 63 dengan nilai rasio sebesar (81,13) dikategorikan ekonomis, pada perhitungan efisiensi dengan 5 program dan 41 dengan nilai rasio (117,95) dikategorikan efisiensi, dan perhitungan efektivitas dengan 2 program dan 26 kegiatan dengan nilai rasio sebesar (94,17) dikategorikan tidak efektivitas. BPKAD Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money* dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target program yang telah ditetapkan, maka sebaiknya lebih maksimal lagi dalam mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah agar memperoleh hasil dari program dan kegiatan dari target yang di tentukan.

**Kata kunci :** *ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, value for money, kinerja.*

## ABSTRACT

The purpose of the study is analysis the financial performance using measurement Value For Money at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. This research is a qualitative descriptive type. The data used is primary data in Government Agency Performance Report at the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah in 2018 and 2019, which are directly from the research object BPKAD Riau Province.

The results at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, in term of economic, efficiency, and effectiveness elements (3E) does't meet the requirements for Value for money principle because there were element had not reached the maximum ratio, In 2018 economic calculations there're 9 programs and 54 activities with a ratio value of (64.92) categorized as economics, efficiency calculations with 6 programs and 32 activities with a ratio value of (190.96) categorized as efficiency, and effectiveness calculations with 2 programs and 25 activities with a ratio value (99.07) categorized as not effective. In 2019 economic calculation with 7 programs and 63 a ratio value of (81.13) was categorized as economics, efficiency calculation with 5 programs and 41 a ratio value (117.95) was categorized as efficiency, and effectiveness calculation with 2 programs and 26 activities with a value ratio of (94.17) is categorized as not effective. BPKAD Riau Province has not met principle of value for money, because the local government is not able to achieve the program targets that have been set, so it is better to be more optimal in maximal Regional Financial Management in order to obtain program results and activities on the specified targets.

***Keywords: economy, efficiency, and effectiveness, value for money, kinerja.***

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis *Value For Money* pada Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda serta adik-adikku dan juga keluarga besar lainnya atas segala kasih sayang, motivasi, semangat, serta selalu mendo'akan setiap langkah penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Firdaus AR, MSi, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Islam Riau
5. Bapak Drs. Abrar, M.Si, Ak, CA selaku Dosen PA saya di fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Islam Riau
6. Bapak Zulhelmy, S.E., M. Sc. Ph.D., Ak., CA., Asean CPA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari.
8. Kepada Seluruh staff tata usaha, staff perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau beserta staff yang memberikan izin dan membantu saya dalam memberikan data kepada peneliti sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan baik.

10. Dan seluruh teman-teman yang bersedia saling berbagi ilmu, pengetahuan, kebersamaan, semangat dan dorongan kepada penulis selama masa perkuliahan khususnya jurusan Akuntansi S1 angkatan 2017 kelas B terima kasih atas kerja samanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh Karena itu, apabila dalam penyusunan ini terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan, maka penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada pembaca. Untuk itu penulis selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Akhir kata penulis memohon kepada ALLAH SWT, semoga pengorbanan dan keikhlasan serta dukungan yang diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang berlipat ganda dan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Penulis,

**FITRIYAH RITONGA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL .....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI .....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN .....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN .....	
ABSTAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 Konsep Kinerja Keuangan .....	10
2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan .....	10
2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran	

Kinerja Keuangan .....	11
2.1.1.3 Informasi yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja Keuangan .....	12
2.1.1.4 Indikator Kinerja .....	14
2.1.1.5 Peran Indikator Kinerja bagi Pemerintah.....	15
2.1.2 <i>Value For Money</i> .....	15
2.1.2.1 Pengertian <i>Value For Money</i> .....	15
2.1.2.2 Gambaran Sistematis <i>Value For Money</i> .....	17
2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat <i>Value For Money</i> .....	19
2.1.2.4 Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	20
2.1.2.5 Langkah-langkah Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran .....	26
2.4 Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian .....	31
3.3 Definisi Variabel Penelitian .....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan .....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran umum objek penelitian .....	36
4.2 Hasil penelitian dan pembahasan .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) .....	3
Tabel 1.2 Laporan Realisasi dan Anggaran .....	5
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 Rekapitulasi ASN berdasarkan jabatan tahun 2018 .....	48
Tabel 4.2 Rekapitulasi ASN berdasarkan jabatan tahun 2019 .....	48
Tabel 4.3 Rekapitulasi ASN berdasarkan Gol./ Ruang tahun 2018 .....	49
Tabel 4.4 Rekapitulasi ASN berdasarkan Gol./ Ruang tahun 2019 .....	49
Tabel 4.5 Rekapitulasi ASN berdasarkan Pendidikan tahun 2018 .....	50
Tabel 4.6 Rekapitulasi ASN berdasarkan Pendidikan tahun 2019 .....	50
Tabel 4.7 Perjanjian kinerja tahun 2018 .....	52
Tabel 4.8 Program kinerja tahun 2018 .....	53
Tabel 4.9 Perjanjian kinerja tahun 2019 .....	54
Tabel 4.10 Program kinerja tahun 2019 .....	55
Tabel 4.11 pengukuran tingkat <i>ekonomi</i> pada program kinerja tahun 2018 ....	57
Tabel 4.12 pengukuran tingkat <i>ekonomi</i> pada program kinerja tahun 2019 ...	65
Tabel 4.13 pengukuran tingkat <i>efisien</i> pada program kinerja tahun 2018.....	74
Tabel 4.14 pengukuran tingkat <i>efisien</i> pada program kinerja tahun 2019.....	79
Tabel 4.15 pengukuran tingkat <i>efektif</i> pada program kinerja tahun 2018 .....	86
Tabel 4.16 pengukuran tingkat <i>efektif</i> pada program kinerja tahun 2019 .....	89
Tabel 4.17 pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja tahun 2018-2019 .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistematis <i>Value For Money</i> .....	17
Gambar 2.2 <i>Value For Money</i> .....	28
Gambar 4.1 Struktur organisasi BPKAD Provinsi Riau .....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Setiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pada pengelolaan keuangan daerah dan kota diurus dan diatur sepenuhnya pada Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada aturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu system terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran.

Menurut Harry (2014), Kinerja keuangan merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi.

Mardiasmo (2016 :121), mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja keuangan sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu : (1) Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah. (2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. (3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran atau penilaian kinerja sektor publik menggunakan metode *Value for Money*. *Value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Indikator *Value for Money* terdapat tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu perolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan harga yang terendah, Efisien yaitu perbandingan *input* atau *output* dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektif yaitu tingkat capaian hasil dari program dengan target yang

sudah ditetapkan, secara sederhana efektif adalah perbandingan *outcome* dengan *output* (Pratiwi, 2017).

Dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi, pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Riau adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan LKjIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018-2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan membuat dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dibuat setiap tahun.

**Tabel 1.1**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Tahun 2018-2019**

NO	URAIAN	2018	2019
		Nilai	Nilai
1	<b>Akuntabilitas kinerja</b>		
	<i>Capaian kinerja</i>		
	Capaian kinerja tahun	99,07 %	97,40 %
	<i>Analisa capaian kinerja</i>		
	Capaian indicator kinerja	98,78 %	98,47 %
	Capaian sasaran dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan dan asset daerah kabupaten /kota se- provinsi Riau	96,49 %	95,8 %
2	<i>Capaian realisasi keuangan kinerja</i>		

Program Keuangan dan fisik dalam pengembangan system pelaporan kinerja dan keuangan	70,62 %	90,65 %
Keuangan dan fisik program perencanaanpembangunandaerah	47,14 %	77,00 %
Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian keuangan dan fisik dengan kebijakan KDH	95,97 %	82,00 %
Program meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan fisik daerah	72,75 %	68,64 %
Program pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan keuangan kab / kota	89,79 %	88,00 %
Nilai hasil evaluasi	83,82	87,24
Kriteria	B	B

Sumber : BPKAD Prov. Riau

Berdasarkan table diatas, LKjIP di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau secara umum pencapaian sasaran melalui program dan kegiatan telah berhasil dengan BAIK dengan maksud sudah Akuntabilitas, namun terdapat beberapa persen (%) indicator kinerja yang belum tercapai sehingga pencapaiannya kurang 100%. Hal ini disebabkan karena adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan mencapai target indikator yang di harapkan. Beberapa hambatan tersebut seperti terdapat ODP dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak mengikuti sosialisasi, terdapat ODP yang terlambatan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Brang Milik Daerah (RKBMD) dan belum di tetapkannya Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang di amanatkan Pemendagri no.19 tahun 2016 tentang pedoman dalam pengendalian Barang Milik Daerah (BMD). Maka dengan melakukan

pengukuran atau penilaian ini dapat mengetahui indikator atau sasaran yang tidak dapat mencapai target, sehingga dapat menemukan perbaikan yang akan dilakukan dimasa atau di periode yang akan datang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau juga bertugas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dibidang keuangan dan aset daerah, kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dapat diamati dari Laporan Realisasi dan Anggaran di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Laporan Realisasi dan Anggaran (LRA)**  
**Tahun 2018-2019**

Uraian	Tahun 2018		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan	483.839.511.321.00	275.638.614.039.74	56,97
Belanja	48.115.065.448.77	38.153.763.349.00	79,30
Tahun 2019			
Pendapatan	190.349.804.292.91	281.615.969.121.61	147,95
Belanja	72.372.676.027.10	52.674.789.401.00	72,78

*Sumber:* BPKAD Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa Realisasi dan Anggaran pada pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pendapatan terealisasi sebesar 56.97% lebih kecil dari target yang dianggarkan dan belanja terealisasi sebesar 79.30%. sedangkan pada tahun 2019 pendapatan terealisasi sebesar 147,95% lebih besar dari yang di anggarkan serta mengalami kenaikan dari

tahun sebelumnya dan belanja terrealisasi sebesar 72,78% lebih kecil dari yang di anggarkan dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam penelitian terdahulu dari Melchior Eugendori Gare (2017) yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja menggunakan *Value For Money* (studikasuk pada Perkumpulan keluarga berencana indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta) menyatakan bahwa PKBI tahun 2013, 2014 dan 2015 mampu mengelola keuangannya dengan ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektifitas dalam tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Srikurnia (2016) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan menggunakan *Value For Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang menyatakan bahwa Ekonomi dalam mengelola anggaran pemerintah namun belum memenuhi syarat Efisien karena untuk penggunaan dana yang minimum dalam mencapai hasil maksimum, dan Efektif dalam program atau kegiatan karena sudah terealisasi sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan fakta dan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitin ini adalah Bagaimana pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Riau tahun 2018 – 2019 berdasarkan rasio ekonomis, efektif, dan efisien

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* yang meliputi rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada program yang terimplementasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaatnya yaitu:

- a. Sebagai pengetahuan tentang kinerja keuangan mengenai anggaran serta realisasi anggaran yang digunakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.
- b. Memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang bagaimana kinerja keuangan di sector publik khususnya di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.
- c. Memberikan informasi bahwa setiap anggaran yang diberikan oleh pemerintah harus di pertanggungjawabkan.

- d. Menambah referensi pustaka dalam karya tulis ilmiah bagi mahasiswa UIR (Universitas Islam Riau).

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan, penulis membagi proposal ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Dalam bab ini berisi teori, ide dan konsep yang berhubungan dengan penelitian sebagai landasan atau pedoman dalam pembahasan masalah yang akan diteliti yaitu tentang teori yang mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *value for money*, langkah-langkah pengukuran *value for money*, konsep kinerja keuangan, indikator kinerja dalam akuntansi sektor publik dan hipotesis

### **BAB III METODE PENELITIAN**

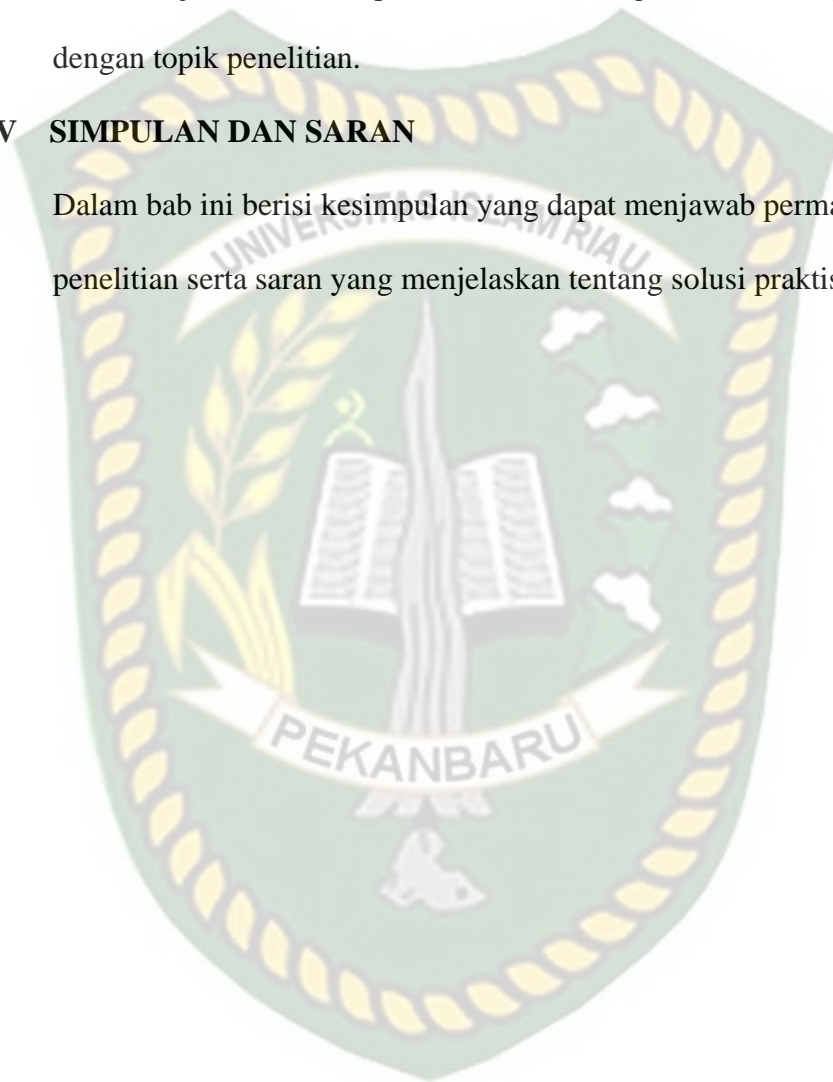
Dalam bab ini menguraikan mengenai Desain Penelitian, Objek Penelitian, Definisi variable penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran umum penelitian, memaparkan serta menjelaskan hasil penelitian secara logis dan telaah pustaka sesuai dengan topik penelitian.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian serta saran yang menjelaskan tentang solusi praktis dan teori



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Telaah Pustaka**

##### **2.1.1 Konsep Kinerja Keuangan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 kinerja adalah hasil keluaran (output) dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi, dan misi organisasi yang terdapat pada strategi planning/ perencanaan suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Hasthoro (2016) Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam organisasi sector public untuk dikaji sejak diterapkannya konsep otonomi daerah yang dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik.

Sistem pengukuran kinerja sector publik adalah sistem yang bertujuan agar membantu manajer publik dalam menilai keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indicator keuangan (Hastthoro, 2016).

Berdasarkan pengertian – pengertian di atas, disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah manifestasi mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam kegiatan operasional sehingga menjadi alat ukur dalam pertimbangan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang di harapkan.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut Munawir (2012:31) tujuan pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut:

a. Mengetahui Tingkat Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan organisasi/ perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dilunasi pada saat ditagih.

b. Mengetahui Tingkat Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan instansi dalam melaksanakan kewajiban keuangan baik kewajiban jangka Panjang maupun jangka pendek.

c. Mengetahui Tingkat Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan instansi untuk memperoleh laba dalam periode tertentu.

d. Mengetahui Tingkat Stabilitas

Stabilitas yaitu kemampuan perusahaan agar terus stabil dan mempertimbangkan kemampuan untuk memenuhi atau melunasi setiap kewajiban dan beban bunga tepat pada waktu yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2011:122) Manfaat pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan Tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

### **2.1.1.3 Informasi yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja keuangan**

Menurut Nursanti (2011) bahwa informasi yang digunakan dalam melakukan pengukuran atau penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

## 1. Informasi Finansial

Hasil laporan kinerja finansial dinilai berdasarkan anggaran yang ditetapkan. Hasil penilaiannya dengan menganalisis varians (perbedaan atau selisih) antara kinerja realisasi dengan anggaran yang ditargetkan. Analisis varians ini secara khusus berfokus pada:

a. Varians pendapatan (*income variant*)

Varians pendapatan yaitu bentuk peningkatan aktiva atau menurunnya kewajiban dari berbagai sumber dalam periode anggaran tersebut.

b. Varians pengeluaran (*output variant*)

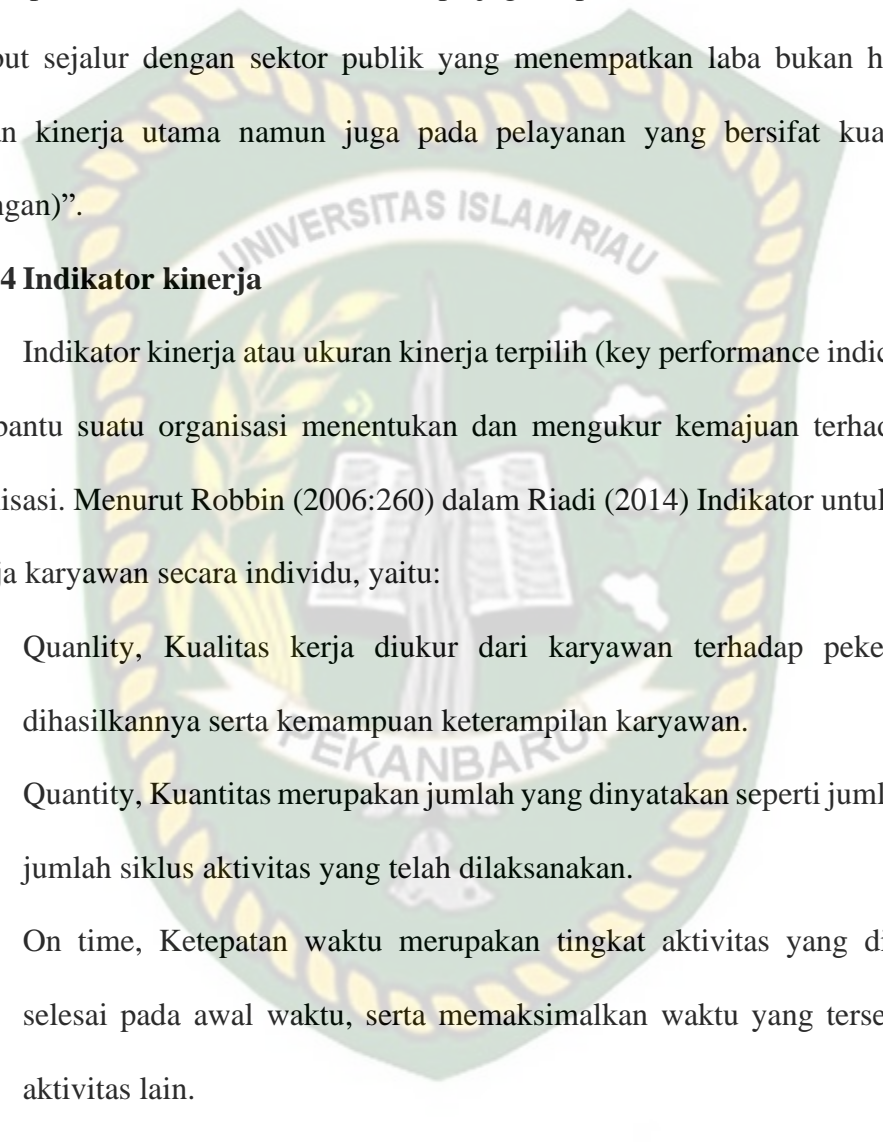
1) Varians belanja rutin, yaitu anggaran untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancar atau sering untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan.

2) Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variant*). Yaitu pengeluaran yang umur manfaatnya cenderung lebih dari satu periode anggaran dan akan menambah kekayaan pemerintah, serta selanjutnya akan menambah anggaran rutin seperti pada biaya operasional dan pemeliharaan.

Setelah melakukan penilaian analisis varians maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya varians dengan menelusuri jenis varians dari level tertinggi hingga level yang paling bawah.

## 2. Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial menambah keyakinan terhadap kualitas pengendalian manajemen. Teknik pengukuran yang komprehensif yang dikembangkan oleh berbagai organisasi yaitu metode *Balance Scorecard*. "*Balanced Scorecard method* merupakan

pengukuran organisasi dari aspek finansial maupun aspek nonfinansial. *Balance Scorecard* dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif (finansial), tetapi juga aspek kualitatif (nonfinansial). Hal tersebut sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya untuk ukuran kinerja utama namun juga pada pelayanan yang bersifat kualitatif (non keuangan)”.  


#### **2.1.1.4 Indikator kinerja**

Indikator kinerja atau ukuran kinerja terpilih (key performance indicators, KPI) membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Menurut Robbin (2006:260) dalam Riadi (2014) Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, yaitu:

1. Quality, Kualitas kerja diukur dari karyawan terhadap pekerjaan yang dihasilkannya serta kemampuan keterampilan karyawan.
2. Quantity, Kuantitas merupakan jumlah yang dinyatakan seperti jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang telah dilaksanakan.
3. On time, Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas yang dilaksanakan selesai pada awal waktu, serta memaksimalkan waktu yang tersedia dengan aktivitas lain.
4. Efektivitas, yaitu tingkat menggunakan sumber daya organisasi (tenaga, bahan baku, uang, dan teknologi) dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari setiap unit atau siklus dalam penggunaan sumber daya.

5. Independence, Kebebasan merupakan tingkat karyawan yang akan melaksanakan fungsi kerjanya dengan komitmen kerjanya serta bertanggungjawab dengan karyawan terhadap instansi.

#### **2.1.1.5 Peran Indikator Kinerja bagi Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2006: 128) dalam Y. Faridah (2013) bahwa peran indikator yang digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
- e. Untuk menunjukkan standar kinerja
- f. Untuk menunjukkan efektivitas
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran
- h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

#### **2.1.2 Value For Money**

##### **2.1.2.1 Pengertian Value For Money**

Dalam konteks otonomi daerah, *Value For Money* merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *Good Governance*. *Value For Money*

tersebut harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Menurut Mahmudi (2015) *Value for money* diartikan sebagai konsep organisasi sektor publik yang diartikan sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja dengan metode *value for money* merupakan pengukuran untuk menilai ekonomi, efektif dan efisien dari program, dan aktivitas di instansi.

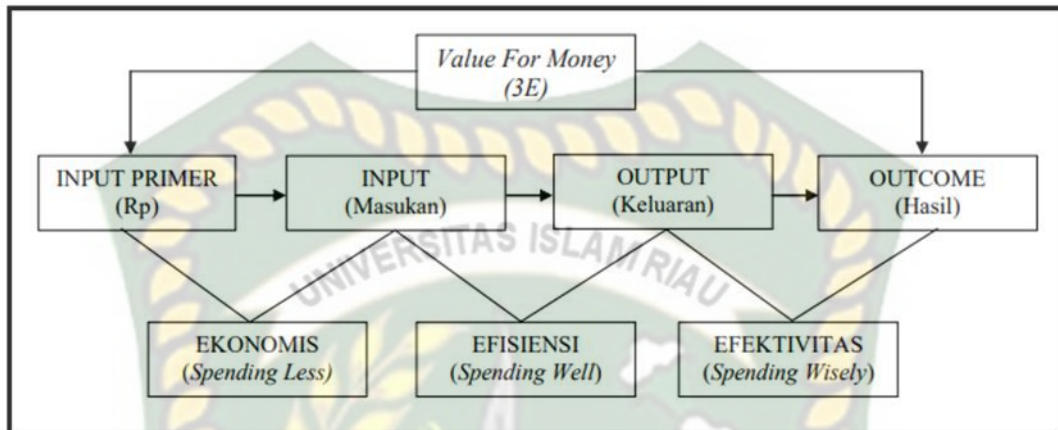
*Value For Money* (VfM) merupakan sumber daya secara efektif, ekonomis dan tanpa pemborosan, dengan memperhatikan total biaya dan manfaat, dan kontribusinya terhadap hasil yang ingin dicapai organisasi. Ini adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan komitmen yang jelas untuk mencapai hasil terbaik dari uang yang di belanjakan (Okoli, Ezenduka, Uzochukwu, & dkk, 2014).

*Value For Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *Good Governance*. Implementasi konsep *value for money* dapat memperbaiki akuntabilitas sector publik dan memperbaiki kinerja sector publik. (Mardiasmo,2011)

#### **2.1.2.2 Gambaran Skema *Value For Money***

*Value For Money* diartikan sebagai konsep dari organisasi sektor publik, untuk memahami mengenai konsep *value for money*, berikut adalah gambaran skema *value for money*.

Gambar 2.1.

Skema *Value For Money*

Sumber :Mardiasmo, 2011

### 1. Pengertian *Input*

*Input* adalah jenis sumber daya masukan yang digunakan untuk proses tertentu dalam menghasilkan sebuah *output*. *Input* berupa bahan baku untuk di proses oleh keahlian tenaga dan keterampilan dalam suatu infrastruktur berupa gedung dan peralatan dengan menggunakan jenis teknologi seperti *hardware* dan *software*.

*Input* terdapat dua jenis, yaitu *input primer* dan *input sekunder*. *Input primer* adalah kas, sedangkan *input sekunder* adalah bahan baku, proses, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu *output*.

### 2. Pengukuran *Input*

Pengukuran *input* yaitu pengukuran sumber daya yang diproses untuk menghasilkan *output*. Proses tersebut berupa program dan aktivitas.

Pengukuran *input* dilakukan dengan membandingkan jenis *input sekunder* dengan *input primer*.

### 3. Pengertian *Output*

*Output* merupakan hasil pencapaian dari suatu program kegiatan, aktivitas, dan kebijakan. Contoh *output* dalam BPKAD adalah tersedianya raperda, terpeliharanya infrastruktur, dll.

### 4. Pengukuran *Output*

Pengukuran *output* adalah membuktikan dan menyakinkan hasil dari implementasi program atau aktivitas.

### 5. Pengertian *Outcome*

*Outcome* adalah hasil yang ditimbulkan dari suatu aktivitas program tertentu. *Outcome* terhubung dengan target atau tujuan yang akan dicapai.

### 6. Pengukuran *Outcome*

Tujuan pengukuran *outcome* untuk mengukur nilai dari suatu aktivitas kegiatan dan program. Pengukuran *outcome* mengukur kualitas dari *output* tersebut. Kualitas *output* artinya dampak yang terdapat pada masyarakat.

Pengukuran *outcome* tidak dapat ditentukan sebelum hasil dari suatu program atau aktivitas ditetapkan, karena *outcome* berupa perbandingan hasil dari pencapaian dengan hasil yang ditargetkan. Maka, untuk mengukur *outcome* dengan baik biasanya dibutuhkan waktu yang cukup panjang.

### 2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat *Value For Money*

Menurut Mahmudi (2011:112) mengemukakan tujuan dan manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efesiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sektor publik.

Manfaat implementasi *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang di berikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu dan pelayanan dalam publik.
3. Menurunkan biaya dalam pelayanan publik, karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi biaya yang lebih terorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan pada uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya ekonomis dan efisien.

#### 2.1.2.4 Pengukuran *Value For Money*

Menurut Halim dan Kususfi (2013:132) *Value For Money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

1. Ukuran kinerja, Umumnya berfokus pada penilaian terhadap kinerja secara langsung, contoh: laporan keuangan pemerintah.
2. Indikator kinerja, fokus pada penilaian terhadap kinerja secara tidak langsung, yaitu yang sifatnya hanya merupakan indikasi kinerja, contoh: kepuasan karyawan, result yang di harapkan.

Dari penjelasan tersebut, bahwa terdapat perbedaan pengukuran kinerja serta indikator kinerja (Mahmudi,2011)

1. Pengukuran kinerja dengan metode *Value For Money*, terdapat dua bagian yaitu *efisiensi dan efektivitas*
  - a. Efisiensi, terbagi menjadi dua yaitu: 1) Efisiensi alokasi, terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. 2) Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan

kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

- b. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif. Hal yang perlu di ketahui adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Penentuan dalam indicator kinerja akan membutuhkan:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi perencanaan, proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa setiap bagian organisasi dengan menggunakan tahap yang ditentukan.
- b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Ini digunakan sebagai ukuran kinerja terhadap kegiatan, program dan organisasi.
- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Merupakan jaminan dalam dukungan melakukan pekerjaan.
- d. Mekanisme ekonomi dan pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian *reward* dan *punishment* yang bersifat keuangan. Sedangkan mekanisme pasar berkaitan dengan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja pegawai dan organisasi sektor publik.

### 2.1.2.5 Langkah – langkah pengukuran *Value For Money*

Pengukuran *Ekonomi* untuk mempertimbangkan masukan yang digunakan, ekonomi merupakan ukuran yang cukup relatif. Pengukuran *Efektif* untuk keluaran yang didapat, dan pengukuran *Efisien* adalah metode penting dari ketiga elemen *Value For Money*.

#### 1. Pengukuran *Ekonomi*

Pengukuran ekonomi membutuhkan data anggaran keluaran dan realisasinya. Untuk menghubungkan seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran berdasarkan keluaran yang dilaksanakan oleh organisasi publik (Dwinanda, 2018). Ekonomi memiliki arti bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. (Purwiyanti, 2017)

Menurut ulum (2012) pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Berikut ini formula untuk pengukuran tingkat ekonomi :

$$\text{Ekonomi: } \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{target anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomis menurut Mahsun (2013:186) adalah:

Jika 100% - keatas : tidak ekonomi

Jika 50% - 100% : ekonomi berimbang

Jika 0% - 50% : ekonomis / sangat ekonomi

## 2. Pengukuran *Efisien*

Pengukuran *efisien* merupakan pencapaian output yang maksimal dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Semakin besar *output* di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat *efisien* suatu organisasi (Mahmudi 2010: 85)

Cara perbaikan terhadap *efisien* adalah:

- a) Meningkatkan *output* pada tingkat input yang sama
- b) Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*.
- c) Menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama.
- d) Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi - proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan *output*.

Secara matematis, rumus efisien dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efisien: } \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output :persentase yang di capai

Input : persentase anggaran/ persentase pagu anggaran

Kriteria menurut Mahsun (2013:187) adalah:

Jika 100% - keatas : efisien / sangat efisien

Jika 50% - 100% : efisien berimbang

Jika 0% - 50% : tidak efisien

### 3. Pengukuran *Efektif*

Pengukuran *Efektif* adalah standar yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. *Efektif* tidak tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan *efektif*. (Mardiasmo, 2010)

Berikut ini formula untuk pengukuran efektif:

$$\text{Efektif} : \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

Keterangan:

Capaian kinerja : realisasi indikator kinerja, indikator kinerja adalah ukuran kuantitas dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Target : hasil yang dicapai secara nyata oleh organisasi

Kriteria menurut Mahsun (2013:187) adalah:

Jika 100% - keatas : efektif / sangat efektif

Jika 50% - 100% : efektif berimbang

Jika 0% - 50% : tidak efektif

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Azizah (2019)	Pengaruh <i>value for money</i> dan akuntabilitas publik terhadap kualitas pelayanan publik pada Rsud Arifin Achmad Provinsi Riau	Dependen : pelayanan publik Independen: <i>Value for money</i>	Penerapan akuntabilitas kinerja pelayanan baik, akuntabilitas kinerja pelayanan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan.
2	Fitriani (2017)	Analisis <i>Value For Money</i> pada Pengukuran Kinerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulu kumba	Dependen : Pengukuran kinerja Independen: <i>Value for money</i>	Pengukuran kinerja dengan metode <i>value for money</i> di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulu kumba dikategorikan ekonomi, efisien, dan efektif.
3	Nur zeniamalia	Analisis <i>Value For Money</i> pada kinerja keuangan di Dinas	Dependen: kinerja keuangan	Kinerja Keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan metode

	putri (2020)	Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Independen: Value for money	analisis <i>value for money</i> pada program kesehatan masyarakat dari tahun 2016 – 2018 berkategori ekonomis, tidak efisiensi, dan efektivitas.
4	I Desak Made Ita Purnamasari (2014)	Analisis Kinerja di Dinas Pendapatan Daerah menggunakan metode <i>Value For Money</i> pada Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Dependen : analisis kinerja Independen: <i>Value for money</i>	Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dengan menggunakan metode <i>Value For Money</i> Audit atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2015 dikategorikan sangat ekonomis, kurang efisien, dan sangat efektif.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam organisasi publik keberhasilan suatu organisasi dinilai dari kemampuan suatu organisasi dalam pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan publik yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan, keyakinan dan dukungan dari publik kepada organisasi publik. Dengan tujuan utama sektor publik adalah pelayanan publik, maka dengan adanya kinerja suatu organisasi dinilai baik tersebut mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan organisasi (Pasalong, 2014)

Dalam konteks otonomi daerah, *Value For Money* merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *Good Governance*. *Value For Money* tersebut harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

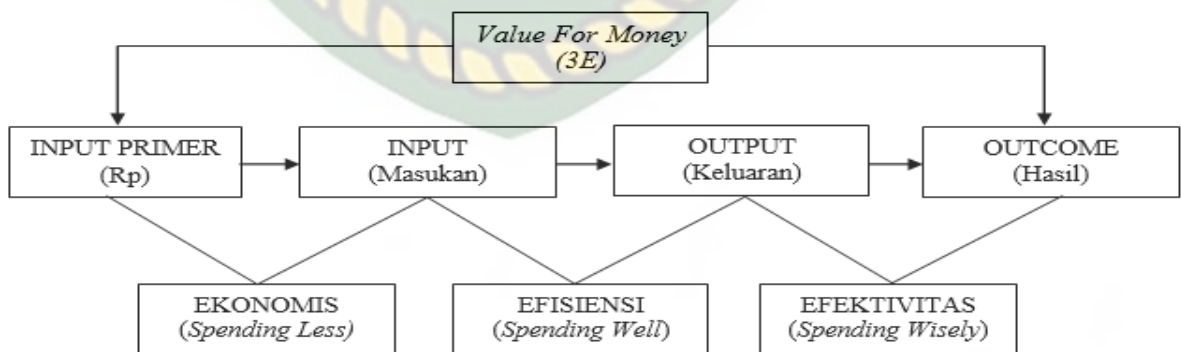
Menurut Mahmudi (2015) *Value for money* diartikan sebagai konsep organisasi sector publik yang diartikan sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja dengan metode *value for money* merupakan pengukuran untuk menilai ekonomi, efektif dan efisien dari program, dan aktivitas di instansi.

Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi, bagaimana organisasi publik mengelola kinerja keuangan dalam menghindari pengeluaran yang tidak produktif dalam menjalankan aktivitas.
- b. Efisiensi, hubungan antara input dan output, dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi agar dapat digunakan untuk mencapai output yang ditentukan.
- c. Efektivitas, hubungan output dengan tujuan, diukur dengan seberapa jauh tingkat output, prosedur, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2  
VFM (Value For Money)

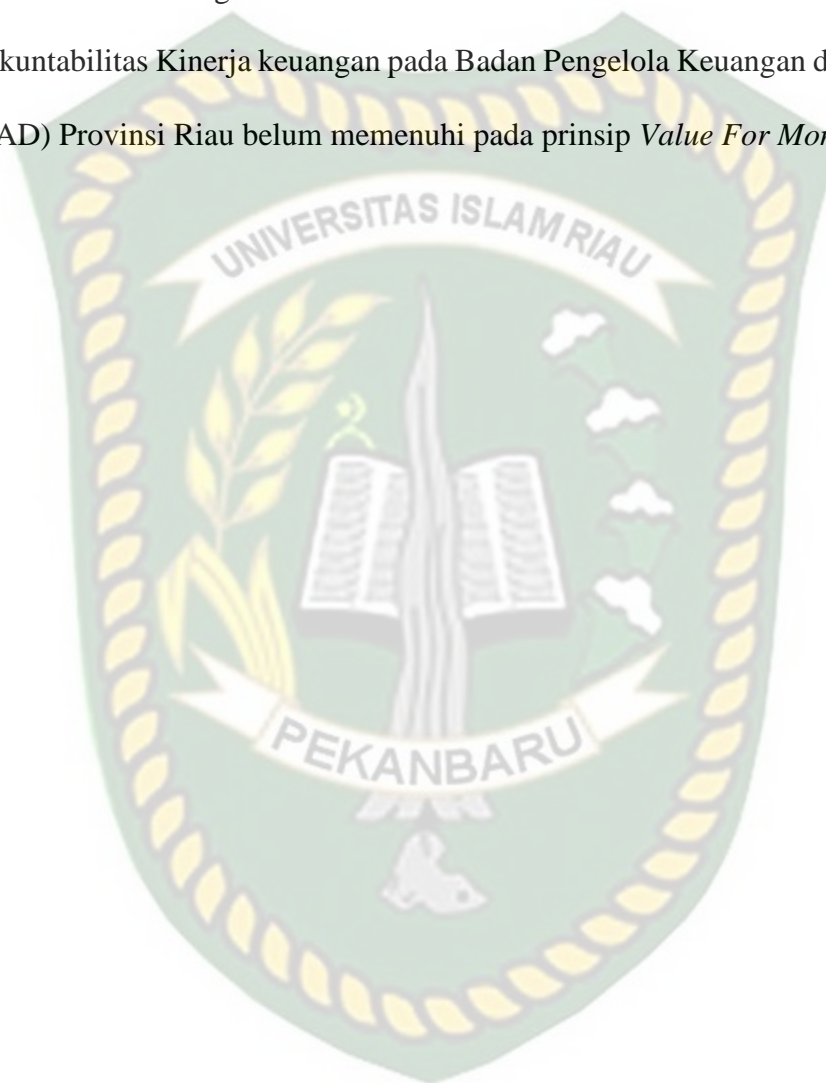


sumber: [www.dictio.id](http://www.dictio.id)

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dibahas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H = Akuntabilitas Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau belum memenuhi pada prinsip *Value For Money*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif merupakan analisis mengenai fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya terhadap kinerja pemerintahan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Penelitian ini berfokus pada dasar untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *Value For Money* yang dikembangkan dalam keuangan, rasio tersebut terdiri dari rasio *ekonomi*, rasio *efisien*, dan rasio *efektif*. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Lapaoran Realisasi dan Anggran (LRA), Laporan Kinerja di Instansi Pemerintah (LKjIP) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau pada tahun 2018-2019.

#### 3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan objek/ tempat yang akan digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, valid dan reliabel (Sugiyono, 2012). Objek dari penelitian ini adalah Badan Pengelolan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Riau.

#### 3.3 Definisi Variabel Penelitian

Defenisi variable dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini yaitu:

### 1. Value For Money

Menurut Mahmudi (2016) *Value for money* merupakan suatu konsep dalam pengelolaan suatu organisasi publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu :

- a. Ekonomi yaitu menentukan bagaimana BPKAD mengelola keuangan untuk menghindari pengeluaran yang tidak produktif dalam menjalankan aktivitas.
- b. Efisien adalah suatu hubungan dengan membandingkan output (keluaran) atau input (input) yang berkaitan dengan standar kinerja yang ditetapkan atau target yang telah ditentukan pada BPKAD Provinsi Riau.
- c. Efektif adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi (BPKAD Provinsi Riau) mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

### 2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan adalah manifestasi mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam kegiatan operasional yang menjadi alat ukur keberhasilan atau tidaknya suatu instansi dalam mencapai tujuan yang di harapkan. (Hasthoro, 2016)

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis yang digunakan adalah data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu diperoleh langsung dari BPKAD provinsi

Riau. Sumber data dalam penelitian merupakan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari bagian keuangan di BPKAD Provinsi Riau.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan melakukan wawancara dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan data dan informasi. Dalam teknik ini peneliti membutuhkan informasi dari Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Riau beserta staffnya.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan. Dilakukan langsung dengan staf di BPKAD Provinsi Riau menggunakan beberapa dokumen, data atau dokumen yang digunakan penelitian adalah Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018-2019 serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018-2019 untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* dengan menggunakan 3 elemen yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis kualitatif yang menyajikan data dan mengukur kinerja dengan metode *Value For Money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2016)

#### a. Ekonomi

Ekonomi (kehematan) merupakan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu aktivitas atau mewujudkan sesuatu. Tingkat ekonomi sebuah anggaran dapat dilihat dengan presentase tingkat pencapaian, tingkatan ekonomi dalam pengelolaan keuangan dilihat dari perbandingan antara perencanaan anggaran dengan realisasinya dan persentase pencapaian tersebut Mahmudi (2011:21).

$$\text{Ekonomi} : \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{target anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria menurut Mahsun (2013:187) adalah:

- Jika 100% - keatas : tidak ekonomi
- Jika 50% - 100% : ekonomi berimbang
- Jika 0% - 50% : ekonomi/ sangat ekonomi

#### b. Efisien

Hubungan antara input dan output dimana input persentase anggaran dan output persentase pencapaian atau realisasi fisik.

$$\text{Efisien} : \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Kriteria menurut Mahsun (2013:187) adalah:

- Jika 100% - keatas : efisien / sangat efisien  
 Jika 50% - 100% : efisien berimbang  
 Jika 0% - 50% : tidak efisien

c. Efektif

Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektif merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Efektif tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

$$\text{Efektif: } \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

Capaian kerja adalah indikator kinerja, indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dari sasaran program yang telah dilaksanakan dengan target yang telah di tetapkan.

Kriteria menurut Mahsun (2013:187) adalah:

- Jika 100% - keatas : efektif / sangat efektif  
 Jika 50% - 100% : efektif berimbang  
 Jika 0% - 50% : tidak efektif

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran umum objek penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan dinas daerah yang berperan dengan fungsi strategi di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang dibentuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berwujud Badan, BPKAD Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Riau dengan Sekretaris Daerah, tugas pokok melaksanakan kebijakan, sistem, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kepada Sekretariat daerah, Bagian bendahara dan Kas Daerah, Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Penganggaran Daerah dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan kepada Gubernur Provinsi Riau sesuai Peraturan Perundang –Undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Riau Nomor 92 Tahun 2016 bahwa Kedudukan dan juga tugas pokok, fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

## 1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

## 2. Tugas dan fungsi ( sesuai dengan SOTK )

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memiliki fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bagian Penganggaran Daerah, Bagian Bendahara dan Kas Daerah, Bagian Akuntansi dan Pelaporan, serta Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Aktualisasi dari tugas dukungan teknis pada Sekretaris, Bagian Penganggaran Daerah, Bagian bendahara dan Kas Daerah, Bagian Akuntansi dan Pelaporan, serta Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan melaksanakan tugas dari dukungan teknis pada Sekretaris, Bagian Penganggaran Daerah, Bagian bendahara dan Kas Daerah, Bagian Akuntansi dan Pelaporan, serta Bagian Pengelola Barang Milik Daerah

4. Melaksanakan fungsi lain yang diberi oleh Gubernur Provinsi Riau dengan terkait tugas dan fungsi yang ditentukan.

### 3. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah pedoman bagi semua pegawai yang bergabung dalam BPKAD Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan aktivitas yang tersedia. Pegawai akan mengetahui apa yang akan dilakukan dan dari siapa kegiatan itu diterima dan kepada siapa kegiatan itu dipertanggung jawabkan. Struktur Organisasi di BPKAD Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau dengan Nomor 92 Tahun 2016 mengenai Kedudukan.

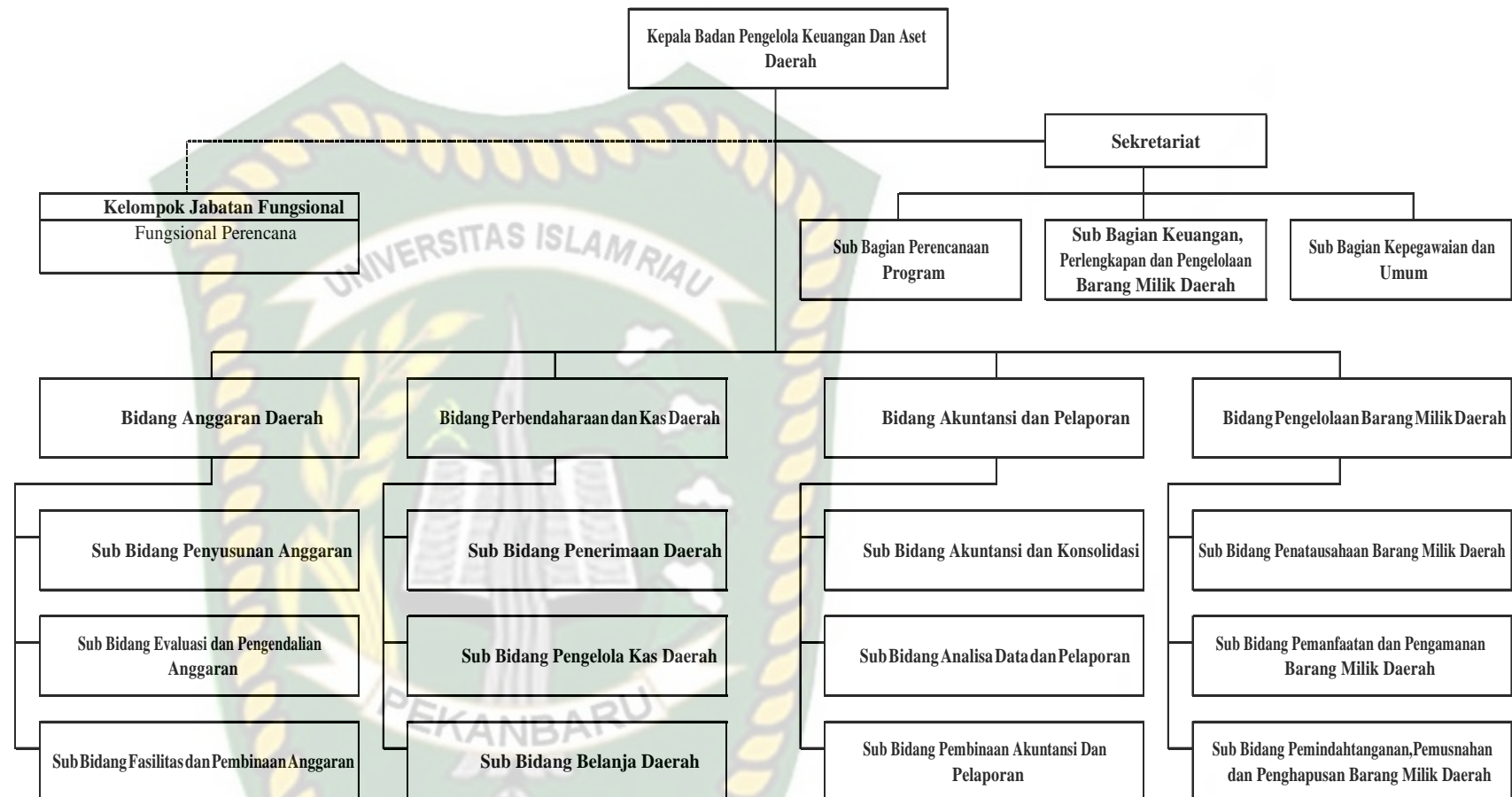
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD Provinsi Riau
2. Sekretaris, yang terdiri :
  1. Sub bagian dari Perencanaan Program
  2. Sub bagian Keuangan, mengenai perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah
  3. Sub bagian dari Pegawai dan Umum.
3. Bagian Penganggaran Daerah, yang terdiri :
  1. Sub bagian Perencanaan Anggaran
  2. Sub bagian Pengevaluasian dan Pengendalian Anggaran
  3. Sub bagian Fasilitasi dan Binaan dalam Anggaran

4. Bagian bendahara dan Kas Daerah, yang terdiri :
  1. Sub bagian Penerimaan Daerah
  2. Sub bagian Belanja Daerah
  3. Sub bagian Pengelolaan Kas Daerah
5. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, yang terdiri :
  1. Sub bagian Akuntansi dan Konsolidasitas
  2. Sub bagian Analisis Data dan Pelaporan
  3. Sub bagian Binaan Akuntansi dan Pelaporan
6. BagianTatausaha Barang Milik Daerah, yang terdiri:
  1. Sub bagianTatausaha Barang Milik Daerah
  2. Sub bagian manfaat dan Pengamanan Barang Milik Daerah
  3. Sub bagian Pemindahtangan, Penghancuran dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk lebih jelas mengenai Struktur Organisasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat Gambar 4.1 berikut.

**GAMBAR 4.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. RIAU**



Sumber : LKJIP BPKAD 2018-2019

Berikut uraian dari tugas masing-masing satuan unit organisasi pada BPKAD Provinsi Riau yang terdapat dalam gambar tersebut :

#### 1. Sekretariat

Tugas :

Melaksanakan sisten dengan fasilitasi dan evaluasi di Sub bagian Perencanaan Program kegiatan , Sub bagian Keuangan, sub bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Sub bagian Kepegawaian Umum.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan operasional dan program kinerja pada Sekretariat
- b. Menyelenggarakan kegiatan sistem dengan fasilitasi dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil tugas dengan Sekretariat
- c. Melakukan pengawasan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan oleh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- d. Melakukan kegiatan kedinasan lain yang diberi oleh pimpinan namun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Bagian AnggaranDaerah

Tugas :

Melaksanakan sistem dengan fasilitasi dan evaluasi di sub bagian penyusunan penganggaran, Sub bagian Pengevaluasian dan Pengendalian Anggaran, serta Sub bagian Fasilitasi dan Pembinaan Penganggaran.

Fungsi :

1. Menyusun program perencanaan operasional kegiatan kerja pada Bagian Penganggaran Daerah
  2. Menyelenggarakan suatu sistem dengan fasilitasi dan melakukan pemeriksaan hasil tugas di lingkungan Bagian Penganggaran Daerah
  3. Melakukan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
  4. Melakukan kegiatan kedinasan lain yang telah diberi pimpinan sesuai kegiatan dan fungsinya.
3. Bagian Bendaharaan dan Kas Daerah

Tugas :

Melakukan suatu sistem dengan fasilitasi serta melaksanakan evaluasi pada Sub bagian Penerimaan Daerah, Sub bagian Pengelolaan Kas Daerah dan Belanja Daerah.

Fungsi:

1. Menyusun rencana operasional program kinerja pada Bidang Bendahara dan Kas Daerah
2. Melaksanakan suatu sistem dengan fasilitasi dan melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan dilingkungan Bagian Bendahara dan Kas Daerah
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan telah ditetapkan oleh kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan

4. Melakukan kegiatan kedinasan lain yang diberi oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Melakukan suatu sistem dengan fasilitasi serta evaluasi pada Sub bagian Akuntansi dan Konsolidasi, Sub bagian Analisis Data dan Pelaporan, dan Sub bagian Binaan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi:

1. Menyusun rencana operasional program kerja pada bagian Penganggaran Daerah
  2. Menyelenggarakan suatu sistem dengan fasilitasi dan melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Akuntansi dan Pelaporan
  3. Melakukan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan yang telah ditentukan
  4. Melakukan kegiatan kedinasan lainnya yang diberi oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- #### 5. Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Sub bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Sub bidang Pemindah tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

Barang Milik Daerah.

Fungsi:

1. Menyusunan rencana operasional program kerja pada Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
  2. Menyelenggarakan koordinasi dengan fasilitasi dan melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
  3. Melakukan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan.
  4. Melakukan kegiatan kedinasan lain yang diberi oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Badan Pengelola Aset dan Daerah Provinsi Riau

#### 4.1 Visi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan organisasi sektor publik yang memiliki visi “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang Baik, Profesional, dan Handal” yang artinya perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, profesionalisme, handal, transparansi, dan pengawasan.

## 4.2 MISI

Berdasarkan visi di atas, adapun misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keahlian, integritas dan profesionalisme serta stabilitasi tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, praktis, memiliki keyakinan hukum dan ketegasan nilai dalam berbasis teknologi informasi
- b. Melaksanakan penegakan dan fasilitasi dalam mengelola keuangan dan aset daerah kabupaten/kota.

## 4.3 Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, BPKAD Provinsi Riau menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Provinsi Riau.
2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset pada daerah Kab/Kota.

## 4.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut adalah sasaran BPKAD Provinsi Riau:

1. Terbentuknya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang sangat berkualitas

2. Terbentuknya pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota yang yang sangat berkualitas

#### 5. Kondisi Strategis Badan Pengelola Keuangan Aset Dan Daerah.

##### a. Ekstern

Dari keadaan tersebut, maka mematuhi perencanaan Strategis ke depan agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang merupakan upaya dalam rangka membentuk suatu Vvsi dan juga misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam mengembangkan regulasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan kompleks membutuhkan SDM dalam kegiatan merencanakan suatu penganggaran, manajemen keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemantauan, melakukan pemeriksaan, serta kehendakan ganti rugi dari keuangan/barang milik daerah.
2. Akuntabilitas keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK-RI merupakan suatu prestasi dan kebanggan yang harus dipertahankan.
3. Penguasaan ilmu teknologi informasi dan juga semangat yang inovatif dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah yang harus dijunjung oleh para jajaran aparatur BPKAD Provinsi Riau untuk menciptakan efisien

dan efektivitas kerja yang terus menerus berkembang melalui learning organization serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

4. Kesuksesan dalam mengelola keuangan daerah memiliki hibah besar terhadap kejuan otonomi daerah dalam memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
5. Menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dapat bertransformasi dengan perubahan regulasi atau peraturan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Intern

Kepegawaian/ Sumber Daya Aparatur Negara, Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 adalah:

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi ASN berdasarkan jabatan**  
**Di lingkungan BPKAD Prov. Riau**  
**Per desember 2018**

Struktural			Fungsional		Jumlah
Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Tertentu (JFT)	Umum (JFU)	
1	5	15	7	92	120

Sumber: Lkjp BPKAD Provinsi Riau tahun 2018

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi ASN berdasarkan jabatan**  
**Di lingkungan BPKAD Prov. Riau**  
**Per desember 2019**

Struktural			Fungsional		Jumlah
Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Tertentu (JFT)	Umum (JFU)	
1	5	15	8	112	141

Sumber :Lkkip BPKAD Provinsi Riau tahun 2019

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi ASN berdasarkan Gol./ Ruang**  
**Di lingkungan BPKAD Provinsi Riau**  
**Per Desember tahun 2018**

No	Golongan	Jumlah ASN
1	IV	13
2	III	89
3	II	18
4	I	0
JUMLAH		120

Sumber: Lkkip BPKAD tahun 2018

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi ASN berdasarkan Gol./ Ruang**  
**Di lingkungan BPKAD Provinsi Riau**  
**Per Desember tahun 2019**

No	Golongan	Jumlah ASN
1	IV	14
2	III	110

3	II	17
4	I	0
JUMLAH		141

Sumber :Lkijp BPKAD tahun 2019

**Tabel 4.5**  
**Rekapitulasi ASN berdasarkan Pendidikan**  
**Di lingkungan BPKAD Prov. Riau**  
**Per Desember tahun 2018**

No	Pendidikan terakhir	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	Sarjana / magister (S2)	27	22,5
2	Sarjana / strata (S1)	53	44,2
3	Diploma (D4)	5	4,2
4	Diploma (D3)	15	12,5
5	SMA / Sederajat	19	15,8
6	SMP / Sederajat	1	0,8
	Jumlah	120	100

Sumber: Renstra BPKAD Prov. Riau

**Tabel 4.6**  
**Rekapitulasi ASN berdasarkan Pendidikan**  
**Di lingkungan BPKAD Prov. Riau**  
**Per Desember tahun 2019**

No	Pendidikan terakhir	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	Sarjana / magister (S2)	31	22
2	Sarjana / strata (S1) / D4	77	54
4	Diploma (D3)	15	11
5	SMA / Sederajat	17	12
6	SMP / Sederajat	1	1
	Jumlah	141	100

Sumber: Renstra BPKAD Prov. Riau

## 6. Perjanjian kinerja pada Tahun 2018 - 2019

Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen yang berisi tugas dan tanggung jawab dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah agar melakukan kegiatannya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan perjanjian kinerja, terbentuknya suatu komitmen yaitu amanah dan kesepakatan atas kinerja berdasarkan fungsi, wewenang dan sumber daya yang telah tersedia.

Kinerja yang telah disepakati tidak membatasi kinerja yang telah dilakukan atas kegiatan periode yang bersangkutan tersebut, maka target kinerja yang janjikan mencakup pada outcome yang dihasilkan dari kegiatan pada periode sebelumnya, sehingga terbentuklah kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari perjanjian kinerja tersebut adalah :

1. Terwujudnya secara nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam meningkatkan kinerja apparatus, integritas, akuntabilitas, dan transparan.
2. Merupakan tolak ukur dalam kinerja dalam mengevaluasi kinerja.
3. Sebagai dasar penilaian kesuksesan atau tidaknya tujuan maupun sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
4. Sebagai pedoman untuk menetapkan sasaran kinerja pegawai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah menata perjanjian kinerja pada tahun 2018 dengan 25 indikator kinerja sedangkan tahun 2019 dengan 26 indikator kinerja. Indikator kinerja yang telah mencakup kinerja utama pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 865/XII/2014, dan indikator kinerja lainnya relevan terhadap sasaran yang akan dicapai.

Berikut uraian dari indikator kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Riau di Tahun 2019 :

**Tabel 4.7**  
**Perjanjian kinerja tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Kesesuaian dari Penyusunan dan perubahan KUAPPAS/KUPA	100%
2	Penyusunan RKA/P dan DPA/P	100%
3	Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Peraturan KDH dan Perda APBD/P	100%
4	Ketersediaan Kas Daerah dalam menyelenggarakan APBD/P Provinsi Riau	100%
5	Pelaporan dari Penerimaan SKPD penghasil yang valid	100%
6	Ketentuan SP2D yang diterbitkan dan tepat waktu	100%
7	Pemeliharaan dan keamanan dari BMD sesuai ketentuan	100%
8	Memanajemenkan BMD OPD sesuai Ketentuan	100%
9	Penyusunan RKBMD OPD yang tepat waktu	100%
10	Pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan	100%
11	Pengalihan BMD sesuai Ketentuan	100%
12	Pemusnahan BMD sesuai dengan ketentuan	100%
13	Penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan	100%

14	Ketentuan dalam Pemeliharaan BMDsesuai ketentuan	100%
15	Ketepatan waktu Laporan Keuangan SKPD yang disusun.	100%
16	Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPDsesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
17	Kesesuaian Laporan Neraca SKPD sesuai SAP	100%

Sumber: Lkjp BPKAD Tahun 2018

Dalam membentuk kinerja yang terdapat di dalam perjanjian kinerja di tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di dukung dengan anggaran untuk melaksanakan kegiatan program yang berkaitan kinerjanya dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Program Kinerja Tahun 2018**

No	Program Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi public Perkantoran	4.165.967.750,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.603.312.250,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	340.863.000,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	529.031.400,00
5	Pengembangan Data/Informasi	81.320.000,00
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	479.520.700,00

7	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	739.319.000,00
8	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.944.813.866,00
9	Pembinaan dan Fasilitas Pengelola Keuangan Kab/Kota	600.326.227,00

Sumber: Lkji BPKAD Tahun 2018

**Tabel 4.9**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Kesesuaian KUAPPAS/ KUPA dengan Perubahan PPAS dan RKPD	100%
2	Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai peraturan	100%
3	Ketepatan Waktu dalam menyusun Perda APBD/P dan Peraturan KDH	100%
4	Ketersediaan Kas Daerah dalam Melakukan APBD/P Provinsi Riau	100%
5	Persentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid	100%
6	Ketepatan waktu SP2D yang diterbitkan	100%
7	Ketentuan dalam Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100%
8	Memanajemenkan BMD OPD sesuai Ketentuan	100%
9	Ketepatan waktu dalam menyusun RKBMD OPD	100%
10	Ketentuan dalam memanfaatkan BMD	100%
11	Ketentuan dalam memindahkan ahli BMD	100%
12	Ketentuan dalam memusnahkan BMD	100%

13	Ketentuan dalam menghapus BMD	100%
14	Ketentuan Pemeliharaan BMDsesuai ketentuan	100%
15	Ketepatan waktu dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD	100%
16	Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
17	Ketentuan Laporan Neraca SKPD dengan StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

Sumber: Lkjiu BPKAD Tahun 2019

Dalam membentuk kinerja yang terdapat di dalam perjanjian kinerja tahun 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memberi anggaran dalam pelaksanaanprogram kinerjanya dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Program kinerja tahun 2019**

No	Program Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi publikPerkantoran	4.016.586.245,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.832.100.325,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur	998.065.900,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan	47.500.000,00
5	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.033.185.042,50

6	Fasilitasi dan pembinaan dalam Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.778.092.960,00
7	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	375.250.000,00

Sumber: Lkijp BPKAD Tahun 2019

#### 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan melakukan perhitungan mengenai bagaimana tingkat ekonomi, efisien, dan efektif terhadap laporan Anggaran dan laporan kinerja BPKAD provinsi Riau di tahun 2018-2019 untuk mengetahui bagaimana Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Riau.

1. Analisis Pengukuran terhadap Kinerja keuangan pada BPKAD Provinsi Riau dari rasio Ekonomi.

Pengukuran rasio ekonomi adalah tingkatan biaya yang digunakan dalam keluaran di instansi untuk pelayanan publik. Menurut Mahsun (2013:179) rasio ekonomi adalah mengukur kehematan dari pengeluaran yang digunakan oleh instansi, pengukuran ini memerlukan data laporan anggaran dan realisasinya.

$$\text{Ekonomi: } \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{target anggaran}} \times 100\%$$

Formula tersebut digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di tahun 2018- 2019.

a. Tahun 2018

**Tabel 4.11**  
**Perhitungan Ekonomi**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2018**

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program pelayanan administrasi publik dan kantor	Aktivitas penyediaan jasa surat menyurat	19.875.000	12.589.000	63,34
	aktivitas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	770.000.024	699.564.532	90,85
	Kegiatan penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	310.125.000	310.093.495	99,99
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	270.960.000	261.462.000	96,49
	Kegiatan menyediakan komponen penerangan bangunan kantor	75.007.750	73.107.750	97,47
	Kegiatan penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	50.000.000	47.416.750	94,83

	Kegiatan penyedia makanan dan minuman	350.000.000	285.805.600	81,66
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.019.999.976	998.042.816	97,85
	Kegiatan penyedia jasa keamanan kantor	250.000.000	215.120.000	86,05
	Kegiatan penyedia jasa administrasi SKPKD	1.000.000.000	839.131.324	83,91
	Kegiatan pengelolaan arsip SKPKD	50.000.000	35.000.000	70,00
Program peningkatan dalam sarana prasarana dan aparatur negara	Kegiatan dalam pengadaan perlengkapan Gedung kantor	479.992.250	216.951.920	45,20
	Kegiatan pengadaan peralatan Gedung kantor	400.000.000	394.700.000	98,68
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	150.000.000	111.829.408	74,55
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	166.000.000	165.934.900	99,96
	Kegiatan rehabilitasi sedang/	207.820.000	59.500.000	28,63

	berat Gedung kantor			
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala genset	100.000.000	25.858.850	25,86
	Kegiatan pemeliharaan dan pengamanan berkala listrik, air dan telepon	100.000.000	94.293.344	94,29
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan normal	185.000.000	73.800.000	39,89
	Kegiatan pembinaan fisik dan mental aparatur	17.000.000	10.500.000	61,76
	Kegiatan dalam meningkatkan SDM pengelolaan BMD provinsi Riau	138.863.000	3.600.000	2,59
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kegiatan pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual	291.053.400	93.349.000	32,07
	Kegiatan dalam penyusunan laporan keuangan semester dan pelaporan prognosis realisasi anggaran	167.978.000	69.960.400	41,65
	Kegiatan penyusunan	70.000.000	41.869.200	59,81

	laporan keuangan ODP Ddan PPKD			
Program pengembangan data / informasi	Kegiatan dalam berpartisipasi pelaksanaan pameran	81.320.000	0	0,00
Program perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan untuk penyusunan APDB (KUA) dan (PPAS)	497.520.700	226.047.792	47,14
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kegiatan revaluasi/appraisal aset/barang daerah	250.000.000	119.827.500	47,93
	Kegiatan peningkatan penyelenggaraan kas daerah	1.974.542.000	1.932.471.187	97,87
	Kegiatan mengsystem dan sinkronisasi, serta rekonsiliasi penerimaan kas daerah	283.178.000	139.944.000	49,42
	Kegiatan Menyusun perencanaan regulasi daerah tentang APBD danperaturan KDH mengenai penjabran APBD	1.249.826.965	1.004.037.970	80,33
	Kegiatan Menyusun perencanaan peraturan daerah	1.019.950.000	364.058.609	35,69

	tentang perubahan APBD			
	Kegiatan Menyusun perencanaan regulasi daerah mengenai pertanggungjawaban melakukan APBD dan KDH	449.998.000	410.277.399	91,17
	Kegiatan untuk menyediakan devisi akuntansi, superevisi dan aparatur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban provinsi Riau	3.874.814.000	3.741.570.157	96,56
	Kegiatan pengembangan sistem informasi keuangan SKPD	979.233.000	947.683.177	96,78
	Kegiatan Menyusun sosialisasi dan sirkulasi peraturan keuangan di daerah	361.785.000	267.988.858	74,07
	Kegiatan penyusunan revisi sistem prosedur pengelolaan kaeuangan daerah	183.590.000	30.126.000	16,41
	Kegiatan dalam membuat HAK dan sertifikat tanah	789.760.000	225.676.214	28,58

	milik pemerintah provinsi Riau			
	Kegiatan penyedia jasa jaminan barang milik daerah	270.758.000	0	0,00
	Kegiatan pengamanan aset milik daerah	768.405.500	147.340.320	19,17
	Kegiatan penilaian aset pemerintah provinsi Riau	350.000.000	324.622.327	92,75
	Kegiatan pemeliharaan aset provinsi Riau	425.459.400	294.348.955	69,18
	Kegiatan Menyusun perubahan regulasi kepala daerah tentang penjabaran APBD	150.000.000	117.462.500	78,31
	Kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah provinsi Riau	250.000.000	247.206.355	98,88
	Kegiatan menyusun keputusan dalam pengelola barang mengenai RKBMD provinsi Riau	353.000.000	113.520.000	32,16
	Kegiatan Menyusun regulasi KDH mengenai	134.680.000	92.000.000	68,31

penetapan status yang menggunakan barang milik daerah			
Kegiatan Menyusun perencanaan KDH tentang sistem dan structural pengelolaan BMD	586.194.000	96.452.150	16,45
Kegiatan merekonsiliasi dan binaan pengelolaan barang milik daerah di pemerintah provinsi Riau	215.273.000	184.918.000	85,90
Kegiatan Menyusun laporan semester dan periode barang milik daerah di SKPD lingkungan pemerintah provinsi Riau	175.200.000	40.350.000	23,03
Kegiatan melakukan inventaris data barang milik daerah pada pemerintah provinsi Riau	720.678.000	660.463.721	91,64
Kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi data barang milik	128.489.000	98.761.300	76,86

	daerah pemerintah provinsi Riau			
Program pembinaan dan fasilitas tentang pengelolakeuan gan di kabupaten/ kota	Kegiatan mengevaluasi Ranperda mengenai APBD kabupaten/kota serta Ranperda mengenai perubahan APBD	144.770.000	144.751.854	99,99
	Kegiatan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	124.480.000	88.154.100	70,82
	Kegiatan pembinaan pertanggungjawaban keuangan kabupaten/kota	135.000.000	105.849.943	78,41
	Kegiatan pembinaan pelaksanaan penyusunan APBD kabupaten/ kota	196.076.227	195.856.727	99,88
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pngendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kegiatan melaksanakan kegiatan operasional secara tertib, pemantauan internal dan binaan barang milik daerah	738.319.000	292.643.042	39,64
Ekonomi		24.483.974.192	17.793.890.446	<b>64,92</b>

Sumber : Data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.11 perhitungan ekonomi BPKAD Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebesar 64,92 % dengan perhitungan terkecil sebesar 0,00% dan perhitungan terbesar sebesar 99,99% pada program tersebut. Dengan capaian di bawah 100% dapat di artikan program kegiatan BPKAD Provinsi Riau tahun 2018 sudah berjalan dengan Ekonomi, dan program/ kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

Peneliti juga melakukan perhitungan ekonomi pada program/ kegiatan tahun 2019. Berikut perhitungan ekonomi program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019.

b. Tahun 2019

**Tabel 4.12**  
**Perhitungan Ekonomi**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2019**

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program pelayanan administrasi perkantoran	Aktivitas penyedia jasa surat menyurat	20.900.000	11.271.000	53,93
	Kegiatan dalam menyediakan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	786.000.000	768.502.590	97,77
	Kegiatan penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	380.500.000	374.578.941	98,44

	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	343.500.000	374.587.941	98,44
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	43.225.000	30.410.000	70,35
	Kegiatan penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	48.367.500	48.336.750	99,94
	Kegiatan penyedia makanan dan minuman	365.750.000	304.538.850	83,26
	Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.308.444.045	1.282.367.715	98,01
	Kegiatan penyedia jasa keamanan kantor	250.000.000	248.790.000	99,52
	Kegiatan penyedia jasa administrasi SKPKD	422.399.700	396.960.600	93,98
	Kegiatan pengelolaan arsip SKPKD	47.500.000	42.525.000	89,52
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Kegiatan pengadaan perlengkapan Gedung kantor	229.725.000	217.230.000	94,56
	Kegiatan pengadaan peralatan Gedung kantor	736.500.000	713.652.000	96,90

	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor	356.750.000	349.209.680	97,89
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlatan Gedung kantor	175.000.000	174.989.200	99,99
	Kegiatan rehabilitas sedang/ berat Gedung kantor	203.400.325	196.463.371	96,59
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala genset	43.225.000	27.486.900	63,59
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala jaringan listrik, air dan telepon	40.000.000	17.330.000	43,33
	Kegiatan pengelolaan Barang milik Daerah	47.500.000	44.231.200	93,12
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan normal	190.000.000	184.274.241	96,99
	Kegiatan pembinaan fisik dan mental aparatur	18.715.000	16.500.000	88,16
	Kegiatan meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola BMD pada	356.250.000	263.431.150	73,95

	pemerintah provinsi Riau			
	Kegiatan kapasitas kinerja pengelolaan keuangan daerah	290.600.900	253.869.400	87,36
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kegiatan penyusunan rencana strategi (RENSTRA) SKPD	47.500.000	43.058.900	90,65
Program meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah	Kegiatan revaluasi/ value aset dalam barang milik daerah	275.500.00	275.082.043	99,85
	Kegiatan peningkatan pelaksanaan pengelolaan kas daerah	296.400.000	295.659.100	99,75
	Kegiatan sistem dan menyinkronkan, serta merekonsiliasi data dari penerimaan kas daerah	373.053.505	294.032.770	78,82
	Kegiatan Menyusun perencanaan peraturan daerah mengenai APBD dan KDH mengenai penjabaran APBD	1.436.880.000	1.231.267.436	85,69
	Kegiatan Menyusun perencanaan peraturan daerah mengenai APBD dan KDH mengenai penjabaran APBD	935.900.000	776.389.359	82,96

	Kegiatan Menyusun perencanaan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban menggunakan APBD dan KDH tentang penjabaran atas pertanggungjawaban melakukan APBD	645.305.265	589.013.238	91,28
	Kegiatan pengembangan sistem informasi keuangan SKPD	940.690.000	737.426.510	78,39
	Kegiatan penyusunan desiminasi, dan sosialisasi regulasi keuangan daerah	348.390.000	334.648.702	96,06
	Kegiatan pemindah tanganan barang milik daerah provinsi Riau	403.750.000	393.027.777	97,34
	Kegiatan mengatur keputusan atas pengelolaan barang atas RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	337.250.000	291.632.050	86,47
	Kegiatan mengatur keputusan KDH tatas penetapan status menggunakan barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	237.500.000	145.604.800	61,31

	Kegiatan mengurutkan KDH atas penetapan status menggunakan barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	352.250.00	56.411.500	16,01
	Kegiatan menyesuaikan dan pengawasan barang milik pemerintah daerah provinsi Riau dan kabupaten/kota	403.750.000	248.301.800	61,50
	Kegiatan mengatur laporan semester dan periode milik pemerintah daerah SKPD dilingkungan provinsi Riau	213.750.000	121.057.320	56,64
	Kegiatan menyelenggarakan pendataan barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	1.078.294.000	1.049.238.600	97,31
	Kegiatan menyesuaikan data barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	237.500.000	209.440.000	88,19
	Kegiatan melakukan regulasi atas perubahan penjabaran APBD periode berjalan	184.393.052	175.292.562	95,06

Kegiatan pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual	403.750.000	202.345.400	50,12
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	987.558.100	752.730.700	76,22
Pembinaan dan monitoring pelaporan entitas akuntansi	215.042.000	176.112.366	81,90
Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	2.412.447.000	2.293.964.000	95,09
Koordinasi dan rekonsiliasi data investasi keuangan daerah	216.601.045	126.174.700	58,25
Koordinasi pengelolaan dana transfer	299.159.600	244.017.200	81,57
Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	427.272.000	181.206.191	42,41
Pemantapan kapasitas aparatur penyusunan anggaran BLUD	189.209.600	185.534.486	98,06
Pengamanan fisik barang milik daerah	243.247.900	133.362.515	54,83

	Pengaman hukum barang milik daerah	1.539.003.600	1.116.558.393	72,55
	Penilaian barang milik daerah	362.661.075	256.678.772	70,78
	Pelaksanaan penatausahaan dan evaluasi penyaluran bantuan keuangan kabupaten/kota	181.450.000	173.532.096	95,64
	Pemeliharaan barang milik daerah	477.478.900	359.275.759	75,24
	Pemeliharaan kendaraan dinas pada pengelola barang	100.343.750	0.00	0.00
	Percepatan peningkatan pelaksanaan transaksi non tunai	277.404.650	203.417.538	73,33
Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Kegiatan evaluasi Ranperda tentang APBD kabupaten/kota dan Ranperda tentang perubahan APBD	558.393.275	532.373.469	95,34
	Kegiatan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	188.247.060	157.486.737	83,66
	Kegiatan pembinaan pertanggungjawaban keuangan kabupaten/kota	185.250.000	155.768.737	83,66

	Kegiatan koordinasi dan evaluasi anggaran BLUD	424.916.290	372.424.235	87,64
	Kegiatan rekonsiliasi data anggaran kabupaten/kota	192.542.675	176.487.982	91,66
	Kegiatan pembinaan anggaran kabupaten/kota	228.743.660	224.744.104	98,25
Program meningkatkan sistem pemantauan internal dan pngendalian dalam melakukan kebijakan KDH	Kegiatan melakukan kegiatan operasional secara tertib, pemantauan internal dan penegakan atas barang milik pemerintah daerah	375.250.000	309.976.133	82,61
Ekonomi		26.080.780.472	21.975.101.687	<b>81,13</b>

Sumber : Data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan ekonomi BPKAD Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebesar 81,13% dengan perhitungan terkecil sebesar 0,00% dan perhitungan terbesar sebesar 99,99% pada program tersebut. Dengan capaian di bawah 100% dapat di artikan program kegiatan BPKAD Provinsi Riau tahun 2019 sudah berjalan dengan Ekonomi, dan program/ kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

2. Analisis Pengukuran terhadap Kinerja keuangan pada BPKAD Provinsi Riau dari rasio Efisien.

Pengukuran efisien merupakan rasio yang membandingkan antara besarnya realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Maka, jika sasaran yang akan dicapai oleh suatu instansi sangat sederhana dengan menggunakan biaya yang besar, maka kebijakan tersebut tidak layak untuk diselenggarakan.

$$\text{Efisien} : \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

*Input* : persentase anggaran / persentase pagu anggaran

*Output* : persentase pencapaian / realisasi fisik

Formula tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisien pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di tahun anggaran 2018- 2019 sebagai berikut:

a. Tahun 2018

**Tabel 4.13**  
**Perhitungan Efisien**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2018**

Program	Kegiatan	Input	Ouput	%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian atas kinerja keuangan	Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual	32,07%	100 %	311,82 %
	Penataan laporan keuangan semester dan penataan atas laporan prediksi realisasi anggaran	41,65%	100%	240,10%
	Penyusunan pelaporan keuangan OPD dan PPKD	59,81%	100%	167,20%

Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA dan prioritas dan pelaporan anggaran sementara PASS)	47,14%	100%	212,13%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Melakukan kegiatan operasional secara tertib, pemantauan internal dan penegakan atas barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	95,97%	100%	104,20%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	47,93%	100%	208,64%
	Peningkatan pelaksanaan pengeluaran kas daerah	97,87%	100%	102,18%
	Koordinasi, sinkronisasi data penerimaan kas	49,42%	100%	202,35%
	Mengatur perencanaan peraturan daerah atas APBD dan KDH mengenai penjabaran APBD	80,33 %	100%	124,49%
	Melakukan perencanaan peraturan daerah atas perubahan APBD dan KDH mengenai	35,69%	100%	280,19%

penjabaran perubahan APBD			
Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	91,17%	100%	109,69%
Penyediaan tenaga akuntansi supervise dan mengembangkan aparatur mengatur laporan pertanggungjabwan provinsi Riau	96,56%	100%	103,56%
Mengembangkan suatu sistem informasi atas keuangan SKPD	96,78%	100%	103,33%
Penyusunan, desiminasi dan sosialisasi regulasi keuangan daerah	74,07%	100%	135,01%
Penyusunan revisi sistem prosedur pengelola keuangan daerah	16,41%	100%	609,38%
Pembuatan atas hak dan sertifikat tanah milik pemprov. Riau	28,58%	100%	349,90%

	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	0,00	0,00
	Pengamanan aset milik daerah	119,17%	100%	83,91%
	Penilaian aset pemerintah provinsi	92,75%	100%	107,82%
	Pemeliharaan aset pemerintah daerah Riau	69,18%	100%	144,55%
	Menyusun perubahan regulasi kepala daerah atas penjabaran APBD periode berjalan karena pergeseran anggaran di perangkat daerah Tahun 2018	78,31%	100%	127,70%
	Pemindahtanganan barang milik daerah pemerintah provinsi Riau	98,88%	100%	101,13%
	Menyusun keputusan dalam pengelola barang atas RKMBD pemerintah daerah provinsi Riau	32,16%	100%	310,95%
	Penyusunan KDH atas penetapan status dalam penggunaan barang milik pemerintah	68,31%	100%	146,39%

	daerah provinsi Riau			
	Menyusun rencana regulasi KDH atas sistem dan juga prosedur pengelolaan BMD	16,45%	100%	607,90%
	Penyesuaian dan penegasan pengelolaan barang milik pemerintah daerah provinsi Riau dan kab/kota	85,90%	100%	116,41%
	menyusun laporan semester dan periode atas barang milik pemerintah daerah SKPD	23,30 %	100%	429,18%
	Pelaksanaan inventaris data barang milik daerah pemerintah provinsi Riau	91,64%	100%	109,12%
	Melaksanakan penyesuaian data barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	78,86%	100%	126,81%
Program penegasan dan fasilitasi atas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	Melakukan pengevaluasian ranperda atas apbd kab/kota dan ranperda mengenai perubahan apbd kab/kota	93,79%	100%	106,62%
	Pembinaan	90,35%	100%	110,68%

	pengelolaan keuangan kab/kota			
	Menyusun laporan keuangan dan evaluasi atas pertanggungjawaban melaksanakan apbd kab/kota	85,24%	100%	117,32%
	<b>Efisien</b>	<b>2115,74%</b>	<b>100%</b>	<b>190,96%</b>

Sumber : data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.13 perhitungan efisien BPKAD Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebesar 190,96% dengan perhitungan terkecil sebesar 0,00% dan perhitungan terbesar sebesar 609,32% pada program tersebut. Dengan capaian lebih dari 100% dapat di artikan program kegiatan BPKAD Provinsi Riau tahun 2018 berjalan dengan efisien, dan program/ kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

Peneliti juga melakukan perhitungan efisien pada program/ kegiatan tahun 2019. Berikut perhitungan efisien program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019.

b. Tahun 2019

**Tabel 4.14**  
**Perhitungan Efisien**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2019**

Program	Kegiatan	Input	Ouput	%
Program peningkatan pengembangan sistem	Penyusunan rencana strategi (renstra) SKPD	90,65%	100 %	110,31%

pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
Program meningkatkan sistem pemantauan internal dan pengendalian dalam melaksanakan kebijakan KDH	Melaksanakan kegiatan operasional secara tertib, pemantauan internal dan penegasan barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	82,00%	100%	121,95%
Program peningkatan dan memperluas pengelolaan keuangan daerah	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	99,00%	78,00%	101,01%
	Peningkatan pelaksanaan pengeluaran kas daerah	99,00%	86,00%	101,01%
	Koordinasi, sinkronisasi data penerimaan kas	78,00%	84,00%	100,00%
	Menyusun perencanaan peraturan daerah atas APBD dan KDH mengenai penjabaran APBD	85,00 %	100%	101,18%
	Menyusun perencanaan peraturan daerah atas perubahan APBD dan KDH mengenai penjabaran perubahan APBD	82,00%	100%	102,44%
	Menyusun perencanaan perda	91,00%	100%	109,89%

atas pertanggungjawaban melaksanakan APBD dan KDH mengenai penjabaran pertanggungjawaban menggunakan APBD			
Pengembangan sistem informasi keuangan SKPD	94,00%	100%	106,38%
Penyusunan, desiminasi dan sosialisasi regulasi keuangan daerah	96,00%	100%	104,17%
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	0,00	0,00%
Pemindahtanganan barang milik daerah pemerintah provinsi Riau	97,00%	100%	103,09%
Menyusun keputusan dalam mengelola barang atas RKMBD pemerintah provinsi Riau	86,00%	87,00%	101,16%
Menyusun KDH atas penetapan status menggunakan barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	61,00%	75,00%	122,95%

Menyusun perencanaan peraturan KDH atas sistem dan prosedur mengelola BMD	14,00%	53,00%	378,57%
penyesuaian dan penegakan pengelolaan barang milik pemerintah daerah pemerintah provinsi Riau dengan kb/kota	61,00%	83,00%	136,07%
Menyusun laporan semester dan periode barang milik pemerintah daerah SKPD dilingkungan provinsi Riau	56,00 %	77,00%	137,50%
Pelaksanaan inventaris data barang milik daerah pemerintah provinsi Riau	97,00%	100%	103,09%
Melakukan penyesuaian data barang milik pemerintah daerah provinsi Riau	88,00%	89,00%	101,14%
Penyusunan regulasi kepala daerah atas perubahan APBD periode berjalan	95,00	100%	105,26%
Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual	50,00%	63,00%	126,00%

Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	76,00%	86,00%	113,16%
Pembinaan dan monitoring pelaporan entitas akuntansi	81,00%	86,00%	106,17%
Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	95,00%	100%	105,26%
Koordinasi dan rekonsiliasi data investasi keuangan daerah	58,00%	65,00%	112,07%
Koordinasi pengelolaan dana transfer	37,00%	81%	218,92%
Penyusunan kebijakan umum APBD	42,00%	58,00%	138,10%
Pemantapan kapasitas aparatur penyusunan anggaran BLUD	98,00%	100,00%	102,04%
Pengamanan fisik barang milik daerah	21,00%	65,00%	309,52%
Pengamanan hukum barang milik daerah	91,00%	100%	109,89%
Penilaian barang milik daerah	70,00%	70,00%	100,00%

	Pelaksanaan manajemen dan evaluasi dalam penyaluran bantuan keuangan di kab/kota	95,00%	100%	105,26%
	Pemeliharaan barang milik daerah	89,00%	87,00%	97,75%
	Pemeliharaan kendaraan dinas pada pengeloan barang	0,00%	0,00%	0,00%
	Percepatan peningkatan pelaksanaan transaksi non tunai	81,00%	81,00%	100,00%
Program penegakan dan fasilitasi pengelolaan keuangan di kabupaten/kota	Melakukan pengevaluasian ranperda atas apbd kab/kota dan perubahan atas apbd kab/kota	95,00%	100%	105,26%
	Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	83,00%		100,00%
	Pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	84,00%	100%	104,76%
	Koordinasi dan evaluasi anggaran BLUD	87,00%	100%	104,60%

	Rekonsiliasi data anggaran kab/kota	72,00%		127,78%
	Pembinaan anggaran kab/kota	98,00%		102,04%
	<b>Efisien</b>	<b>3054,65%</b>	<b>100%</b>	<b>117,95%</b>

Sumber: Data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.14 perhitungan efisien BPKAD Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebesar 117,95% dengan perhitungan terkecil sebesar 0,00% dan perhitungan terbesar sebesar 309,52% pada program tersebut. Dengan capaian lebih dari 100% dapat di artikan program kegiatan BPKAD Provinsi Riau tahun 2019 berjalan dengan efisien, dan program/ kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

3. Analisis Pengukuran terhadap Kinerja keuangan pada BPKAD Provinsi Riau dari rasio Efektif.

Menurut Mahsun (2013:182) Efektif diukur dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output. Yang mana outcome adalah dampak atau hasil dari suatu aktivitas, sedangkan output adalah hasil yang dicapai dari suatu bentuk program kinerja dan kebijakan. Sehingga ukuran efektif sebagai suatu standar terpenuhinya atau tidak sasaran dan tujuan yang dicapai suatu organisasi.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{capaian kerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

*Capaian kerja* : realisasi indikator kinerja, Indikator Kinerja adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

*Target* :hasil yang akan dicapai secara nyataoleh organisasi.

Formula tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat efektif yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2018- 2019.

a. Tahun 2018

**Tabel 4.15**  
**Perhitungan Efektif**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2018**

Sasaran strategi	Indikator kinerja	Target	Capaian kinerja	%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ProvinsiRiau	Persentase dalam menyesuaikan KUAPPAS/KUPA dengan Perubahan PPAS RKPD	100	100,00	100,00
	Persentase ketetapan dalam menyusun RKA/Pdan DPA/P sesuai peraturan yang ditetapkan	100	100,00	100,00
	Persentase Ketepatan Waktu dalam menyusun Perda APBD/P dan Peraturan KDH atas Penjabaran APBD/P	100	100,00	100,00
	Persentase melaksanakan ketersediaan Kas Daerah dalam APBD/P Provinsi Riau	100	100,00	100,00

Persentase penghasilan yang valid dari Laporan Penerimaan SKPD	100	100,00	100,00
Persentase ketepatan waktu SP2D yang diterbitkan	100	100,00	100,00
Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100	100,00	100,00
Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	100	100,00	100,00
Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	100	87,50	87,50
Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100	100,00	100,00
Persentase Pemindah tangan BMD sesuai ketentuan	100	89,47	89,47
Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100	100,00	100,00
Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100	100,00	100,00
Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100	100,00	100,00
Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan SKPD yang disusun	100	100,00	100,00
Persentase kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,00
Persentase kesesuaian Laporan Neraca SKPD dengan	100	100,00	100,00

	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)			
	Persentase kesesuaian Laporan Operasional (LO) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,00
	Persentase kesesuaian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,00
	Persentase kesesuaian Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,00
	Persentase pertanggungjawaban Ranperda dalam Pelaksanaan APBD dgn Perda APBD/APBD-P	100	100,00	100,00
	Persentase kesesuaian Ranperda mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD dengan LHP BPK	100	100,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya Berkualitas	100	100,00	100,00
	Persentase kesesuaian Kab/Kota dengan Laporan Keuangan SAP	100	100,00	100,00
	Persentase ketepatan waktu Kab/Kota melaksanakan Evaluasi Ranperda yang	100	100,00	100,00

	mempertanggungjawaban APBD Kab/Kota			
		Efektif		99,07

Sumber: Data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.15 perhitungan efektif BPKAD Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebesar 99,07% dengan perhitungan terkecil sebesar 87,50% dan perhitungan terbesar sebesar 100,00% pada program tersebut. Dengan capaian kurang dari 100% dapat di artikan program kegiatan BPKAD Provinsi Riau tahun 2018 dikategorikan tidak efektif, dan program/ kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

Peneliti juga melakukan perhitungan efektif pada program/ kegiatan tahun 2019. Berikut perhitungan efektif program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tahun 2019

b. Tahun 2019

**Tabel 4.16**  
**Perhitungan Efektif**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2019**

Sasaran strategi	Indikator kinerja	Target	Capaian kinerja	%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Persentase kesesuaian penyusunan RKA/Pdan DPA/P dengan regulasi yang ditetapkan	100	100,00	100,0
	Persentase penyusunan dalam ketepatan Waktu Perda APBD/P dan Peraturan KDH atas Penjabaran APBD/P	100	100,00	100,0
	Persentase pelaksanaan	100	100,00	100,0

ketersediaan Kas Daerah dalam APBD/P Provinsi Riau			
Jumlah disusunnya regulasi atas pengelolaan keuangan daerah	2regulasi	2regulasi	100,0
Jumlah perubahan ranperda dan ranpergrup atas penjabaran APBD periode berjalan	2dokumen	2dokumen	72,00
Persentase penghasilan laporan penerimaan dari SKPD yang valid	100	100,00	100,0
Persentase ketepatan waktu SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan	100	100,00	100,0
Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100	87,00	87,00
Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	100	92,68	92,68
Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	100	97,50	97,50
Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100	93,00	93,00
Persentase Pemindah tangan BMD sesuai ketentuan	100	100	100,0
Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100	100,00	100,0
Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100	91,66	91,66
Persentase meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara pengelola BMD	100	100,00	100,0

Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan SKPD yang disusun.	100	100,00	100,0
Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,0
Persentase kesesuaian Laporan Neraca SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,0
Persentase kesesuaian Laporan Operasional (LO) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,0
Persentase kesesuaian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,0
Persentase kesesuaian Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100,00	100,0
Persentase konsisten Ranperda bertanggungjawab Pelaksanaan APBD dengan Perda APBD/ APBD-P	100	100,00	100,0
Persentase kesesuaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan LHP BPK	100	100,00	100,0
Jumlah yang terintegritas di aplikasi SIKD	3 aplikasi	3 aplikasi	100,0
Persentase penyusutan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100	100,00	100,0
Persentase Kab/Kota yang	100	96,00	96,00

Meningkatnya Kualitas Kinerja	Penyusunan Anggarannya Berkualitas			
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan Evaluasi Ranperda atas Pertanggungjawaban dengan APBD Kab/Kota tepat waktu	100	100,00	100,0
Efektif				94.17

Sumber: Data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.16 perhitungan efektif BPKAD Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebesar 94,17% dengan perhitungan terkecil sebesar 87,00% dan perhitungan terbesar sebesar 100,00% pada program tersebut. Dengan capaian kurang dari 100% dapat di artikan program kegiatan BPKAD Provinsi Riau tahun 2018 dikategorikan tidak efektif, dan program/ kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

Berikut merupakan hasil dari perhitungan tingkat ekonomi, efisien dan efektif dari laporan Anggaran dan laporan kinerja instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Riau.

**Tabel 4.17**  
**Pengukuran Tingkat Ekonomi, Efisien dan Efektif**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2018-2019**

Kriteria	Tahun	Hasil pengukuran	Keterangan
Ekonomis	2018	64,92	Ekonomis
	2019	81,13	Ekonomis
Efisien	2018	190,96	Efisien
	2019	117,95	Efisien

Efektif	2018	99,07	Tidak efektif
	2019	94,07	Tidak efektif

Hasil dari penelitian ini bahwa terealisasinya suatu program diukur dengan tingkat ekonomis pada tahun 2018 dan 2019 berada pada kriteria ekonomi, pertahunnya mengalami fluktuasi yaitu naik dari pada tahun sebelumnya. Kriteria ekonomi merupakan kinerja yang baik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Konsep ekonomi ialah penghematan anggaran untuk suatu input dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

Hasil pengukuran dari efisiensi tahun 2018 dan 2019 dengan kriteria efisien. Ini berarti hasil perhitungan tingkat efisiensi yang lebih dari persentase 100%. Efisien adalah membandingkan antara input dengan output. Suatu organisasi dapat efisien apabila mampu menghasilkan output yang maksimal dengan input yang rendah.

Pengukuran tingkat efektif di tahun 2018 dan 2019 berkategori tidak efektif karena belum mencapai seluruh program kinerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil suatu kegiatan program yang ditentukan sudah berjalan dengan baik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Tingkat ekonomi tahun 2018 dan 2019 dikategorikan ekonomi karena berada pada rasio di bawah 100%. Ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah sudah melakukan sumber daya finansial seminimal mungkin dalam merealisasikan anggaran untuk program/kegiatan yang ingin dicapai serta setiap tahunnya mengalami kenaikan pembaharuan yang cukup signifikan.
2. Tingkat efisien untuk realisasi anggaran tahun 2018-2019 berada pada kategori efisien dikarenakan hasil rasio efisien menunjukkan lebih dari 100%. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan program/kegiatan sudah efisien dalam penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.
3. Tingkat efektif pada kinerja keuangan di tahun 2018-2019 dikategorikan tidak efektif. Karena menunjukkan bahwa program kinerja yang telah di targetkan atau yang di programkan sudah terealisasi dan sesuai akan tetapi hasilnya belum mencapai tujuan dan sasaran dengan yang diharapkan.
4. Akuntabilitas kinerja keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau belum memenuhi pada prinsip Value For Money

## 5.2 Saran

Saran yang penulis sampaikan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau antara Lain :

1. Dilihat dari tingkat ekonomi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada program/kegiatan sehingga dapat memaksimalkan kinerja pada setiap program/kegiatan agar dapat terlaksana sesuai target dan tujuan yang diharapkan.
2. Dilihat dari tingkat efisien, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau harus tetap dan akan terus memperhatikan perencanaan dan pengendalian realisasi anggaran belanja dibandingkan realisasi anggaran pendapatan, karena secara keseluruhan rasio efisiensinya dikategorikan efisien.
3. Dilihat dari tingkat efektif, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk tahun selanjutnya harus dapat meningkatkan kinerjanya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. (2018). *Laporan kinerja Instansi Pemerintah BPKAD*. Pekanbaru: bpkad.riau.go.id
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. (2019). *Laporan kinerja Instansi Pemerintah BPKAD*. Pekanbaru: bpkad.riau.go.id
- Dwinanda, Yosie. (2018, Mei). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Faridah, Yahya. (2013 September 28) *Pengukuran Kinerja Pengolahan Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Gresik*. Dipetik April 22, 2018, dari Etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : <http://etheses.uin-malang.ac.id/2021/6/09520073Bab2.pdf>
- Gare, Muhammad. E.(2017). *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money*. Yogyakarta.
- Harmony, Bagus. (2020, april 28). *Kinerja Keuangan*. Retrieved 2019, from harmony.co.id : <https://www.harmony.co.id/blog/apa-itu-kinerja-keuangan-berikut-penjelasan-lengkapny>
- Hastthoro, Handoko. A. (2016). *Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra Yogyakarta*, 56.
- Indriaswari, Lelly. K. (2017). *Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan*. Yogyakarta, Banyumas. Badan penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014*. Retrieved Januari 2021, from Sumbarprov: <https://sumbarprov.go.id/images/Biroumum/permenpan-53-tahun-2014-1.pdf>
- Liando, Saerang & Elim. (2014, September). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Value For Money*. *Jurnal EMBA*, vol.2 no.3, 1687.
- Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKP

- Mahsun, Mohamad.(2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* . Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nursanti, Anita. P. (2011, Oktober 03). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Retrieved Oktober 07, 2012 from: <http://anitaputrinursanti.blogspot.com/2012/10/pengukuran-kinerja-sektor-publik>.
- Okoli, C. I., Ezenduka, C. C., Uzochukwu, B. S., & dkk. (2014). Mencapai Nilai Untuk Uang dalam Perawatan Kesehatan: Prinsip, Metode, dan Aplikasi Empiris. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Afrika*, 2.
- Pasalong. (2010). *Teori Administrasi Publik*, Jakarta: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 *Organisasi Perangkat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4741.
- Pratiwi, Amelia. I., & Nursandia, E. (2017, July 10). Analisis Pengukuran Kinerja Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 11.
- Purwiyanti, Dwi. (2017, Maret). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *EJurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 3 , 194.
- Putri , Nurzeni. A. (2020). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. *EJurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8 (12), 1-16.
- Sari, Novita. C. (2013). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 9-11.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ulum, Ihyaul. (2012). *Audit Sektor Publik* . Jakarta : Bumi Aksara .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4438.

Usgawati, Afiati. (2013, Desember). *Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Retrieved 2013. from datakata.wordpress.com: <https://datakata.wordpress.com/2013/12/03/sistem-pengukuran-kinerja-sektor-publik>.

Wirasata, Putu. (2010) Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Metode Balance Scorecard, *Analisis Pengukuran Kinerja RSUD Tg. Uban Provinsi. Kepulauan Riau dengan Metode Balance Scorecard*, 13-23.

